



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIADI NOOR
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 259280

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.340.084.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/36 m² di KAB / KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 40.084.000
2. Tanah Seluas 399 m² di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 220 m² di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 1750 m² di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 66 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **217.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **10.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.084.598.122
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.651.682.122
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.651.682.122

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.